

Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

¹Cepi Triana Safari

¹Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya; cepi.triana33@gmail.com

Abstract

The implementation of regional autonomy and decentralization has implications for the broadening of regional authorities to regulate and manage regional revenues. The purpose of this study was to determine the performance of regional revenue in the Garut Regency's statement of budget realization since 2013-2017 fiscal years. The theory that I use in this study is the theory of Mahmudi (2016) which states that to analyze the performance of regional revenue can be done by analyzing the variance (difference) revenue budget, analysis of revenue growth, and financial ratio analysis. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the regional revenue performance of Garut Regency in the 2013-2017 fiscal years based on the analysis of variance (difference) of the revenue budget was considered to be poor and then based on revenue growth was considered quite good. The regional revenue performance of Garut Regency 2013-2017 fiscal years based on the degree of decentralization ratio is considered less, based on the regional financial dependency ratio is still considered very high, and based on regional financial independence ratios was considered very low and included in the pattern of instructive relations.

Keywords: *Regional Revenue Performance, Analysis of Variance Revenue Budget, Analysis of Revenue Growth, Financial Ratio Analysis.*

Pendahuluan

Perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi di Indonesia dilaksanakan melalui penerapan kebijakan otonomi termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah termaktub dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Penerapan kedua Undang-Undang tersebut membawa konsekuensi terhadap penyediaan sumber keuangan daerah yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pemerintahan di daerah otonom. Penyelenggaraan hak-hak tersebut membuat daerah berkewenangan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri.

Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk pelaksanaan APBD pemerintah daerah wajib melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Elemen dari lapran keuangan pemerintah daerah salah satu di antaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Melalui LRA dapat dilakukan analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan daerah. Keuangan daerah menurut Mamesah (1995) dalam (Halim, 2004:18) adalah harta daerah yang berupa kekayaan yang diakui dan dimiliki oleh daerah atau negara yang tingkatnya lebih tinggi posisinya, dapat berupa uang atau barang yang merupakan semua kewajiban serta hak yang tepat berdasarkan peraturan.

Laporan ini membandingkan antara penerimaan dan pengeluaran dengan masing-masing anggaran pertahunnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga dapat diketahui hal tersebut digunakan apa saja dalam priode tersebut. Setiap satu priode yang telah berlangsung maka dalam laporan realisasi ini dibandingkan, yang selanjutnya akan terdapat sumber dananya darimana, dialokasikan dimana dan pemakaiannya seperti apa (Suwanda, 2015:71).

Kinerja pendapatan daerah menurut Mahmudi (2016) secara umum yaitu jika manifestasi kinerja berada dibawah jumlah yang dianggarkan, maka kinerjanya dianggap buruk. Evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pendapatan, perlu dilakukannya anggaran yang melebihi target dibuktikan dengan bagian pendapatan yang paling dominan. Untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah menurut Mahmudi (2016) perlu adanya upaya-upaya sebagai berikut:

1. Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Pelaksanaan pendapatan kinerja yang berupa anggaran pendapatan maupun keuangan dapat diukur dan dinilai melalui analisis varians (selisih) dan juga dapat diketahui daya guna yang diperoleh dari target yang telah ditentukan. Ketika pemerintah bisa mendapatkan pendapatan yang melampaui target yang telah ditetapkan maka kinerja pendapatan tersebut dianggap bagus. Sedangkan, ketika pemerintah mendapatkan pendapatan dibawah target yang telah ditentukan maka kinerja pendapatan tersebut dianggap kurang bagus. (Mahmudi, 2016).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{\text{Pendapatan Th (t - 1)}} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan memiliki tujuan yang di antaranya adalah guna memahami dalam suatu tahun anggaran dalam pemerintah ataupun beberapa periode, dapat mengetahui apakah terjadi pertumbuhan yang negatif atau positif dalam kinerja anggaran. Secara ideal, pendapatan tersebut dapat tumbuh dan diharapkan bisa cenderung meningkat serta hasil yang positif. Namun, apabila hasil negatif yang ada atau tumbuh, hal tersebut akan mengindikasikan terjadinya kinerja yang turun serta harus dapat diketahui faktor yang memicu hal itu. (Mahmudi, 2016). Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut:

3. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan salah satunya dipakai untuk menganalisis pendapatan guna mengevaluasi kinerja menurut Mahmudi (2016) adalah sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Meningkatnya pendapatan asli daerah membuat peningkatan yang tinggi terhadap bisa atau tidaknya pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi. Pada dasarnya derajat desentralisasi ini dibuat sebagai tolak ukur antara jumlah pendapatan dan penerimaan daerah. (Mahmudi, 2016:140). Proses tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1.1

Kriteria Tingkat Derajat Desentralisasi

| Persentase PAD | Kemampuan Keuangan Daerah |
|-----------------------|----------------------------------|
| 0,00 – 10,00 | Sangat Kurang |
| 10,01 – 20,00 | Kurang |
| 20,01 – 30,00 | Sedang |
| 30,01 – 40,00 | Cukup |
| 40,01 – 50,00 | Baik |
| > 50,00 | Sangat Baik |

Sumber: Banga (2017)

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Melalui cara perhitungan ini kita dapat mengetahui jika rasio ini semakin tinggi maka ketergantungan pemerintah daerahpun memiliki tingkat yang besar kepada pemerintah pusat (Mahmudi, 2016). Sebagaimana rumus berikut ini:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1.2

Ukuran Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

| %DAPER/TPD | Tingkat Ketergantungan Daerah |
|-------------------|--------------------------------------|
| 0,00 – 10,00 | Sangat Rendah |
| 10,01 – 20,00 | Rendah |
| 20,01 – 30,00 | Sedang |
| 30,01 – 40,00 | Cukup |
| 40,01 – 50,00 | Tinggi |
| > 50,00 | Sangat Tinggi |

Sumber: Hidayat (2017)

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Jenis rasio pada prinsipnya dihitung dengan melakukan perbandingan antara total penerimaan asli daerah dan total penerimaan transmisi dari pemerintah pusat dan provinsi juga pinjaman daerah. Angka rasio yang semakin tinggi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah semakin tinggi (Mahmudi, 2016). Dalam mengkalkulasikan rasio kemandirian keuangan daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah tabel yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui pola hubungan dengan kemampuan daerah dilihat dari sisi keuangannya:

Tabel 1.3
Tipe Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Rendah sekali | 0% - 25% | Instruktif |
| Rendah | 25% - 50% | Konsultatif |
| Sedang | 50% - 75% | Partisipatif |
| Tinggi | 75% - 100% | Delegatif |

Sumber: Halim (2004)

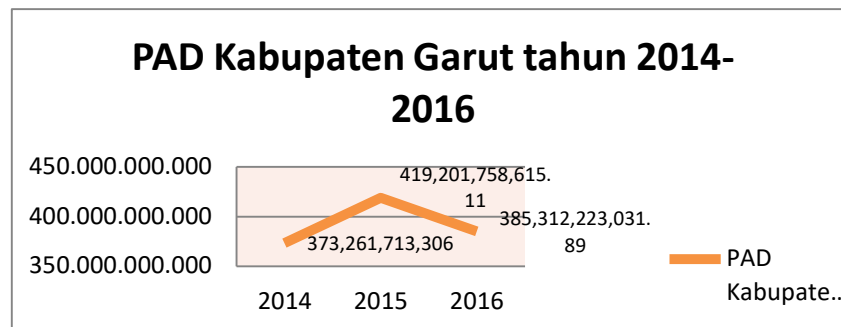
- 1) Tipe hubungan instruktif, yaitu tidak adanya kontribusi dari daerah yang mereka belum bisa menjalankan otonomi daerahnya, dibandingkan dengan kontribusi pemerintah pusat yang lebih menonjol dalam membantu menjalankan otonomi daerah tersebut.
- 2) Tipe hubungan konsultatif, yaitu pemerintahan daerah yang mulai sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerahnya sehingga pemerintah pusat sudah mulai tidak ikut campur tangan di daerah tersebut.
- 3) Tipe hubungan partisipatif, yaitu pemerintah daerah sudah >50% mampu menjalankan roda pemerintahannya sendiri.
- 4) Tipe hubungan delegatif, dari hubungan ini pemerintah daerah sudah bisa sendiri dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya. Pemerintah pusatpun sudah tidak ikut mengatur secara intensif lagi daerah tersebut.

Sebuah analisis yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya pemerintahan dalam menjalankan anggarannya, dinilai baik jika anggaran tersebut sesuai dan melampaui jumlah yang telah ditetapkan. Analisis tersebut menggunakan analisis pendapatan daerah yang dibuat oleh pemerintahannya itu sendiri untuk menilai kinerja daerah tersebut. Berdasarkan pada Perda Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut, dalam Pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa total perolehan yang dimasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perhitungan yang masuk akal, realistis, dapat diukur, dan tercapai bagi tiap sumber penerimaan. Sementara itu, penerimaan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Garut selama tahun 2013-2017 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Beban pemerintah daerah semakin besar dikala pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya kepada daerah, yang mana diharuskannya pendapatan daerah yang lebih meningkat lagi. Besarnya potensi yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Garut tidak serta merta membuat daerah mampu menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Bahkan pada tahun 2016 pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten Garut terjadi penyusutan pendapatan daerah yang cukup berarti, keadaan tersebut terdapat dalam grafik berikut.

Grafik 1.1

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2016

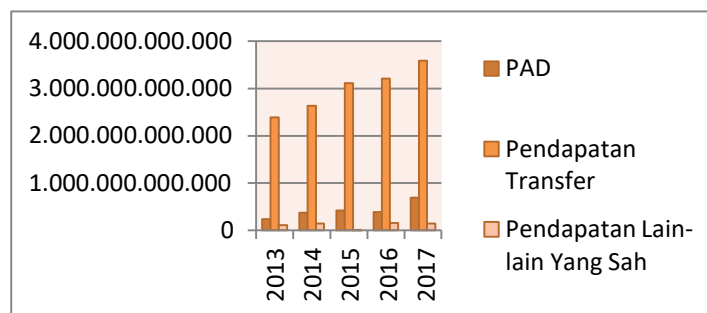


Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Garut setiap tahunnya selalu lebih tinggi daripada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keadaan tersebut terdapat dalam grafik berikut.

Grafik 1.2

Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut 2013-2017



Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dideskripsikan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut, kinerja pendapatan ini mencerminkan capaian realisasi pendapatan dan komponen pendapatan apa saja yang berkontribusi tinggi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Apabila jumlah pendapatan yang diinginkan tidak berhasil maka dibutuhkan pengkajian ulang, tentang sebab dari pendapatan yang tidak memuaskan tersebut. Sebab anggaran pendapatan daerah salah satu targetnya yaitu sedikitnya harus terlampaui jumlah pendapatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan suatu tujuan yaitu untuk menganalisis kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017.

Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang diambil dalam penelitian ini, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam rangka untuk memperoleh data yang diharapkan, perlu dilakukan suatu cara tepat yang akan dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam secara terstruktur. Melalui wawancara yang terstruktur, pengumpul data dapat didapatkan dari beberapa pewawancara. Informan dapat ditentukan melalui *purposive* teknik, yang memiliki arti bahwa informan tersebut dapat dipilih secara

sengaja karena dianggap mampu menambah data dalam penelitian. Selain itu penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu data penelitian yang diperoleh dari studi pustaka. Mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan pokok-pokok penelitian. Proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan pencarian dan penyusunan yang terstruktur dari data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan lainnya. Peneliti menggunakan model Miles dan Huberman tentang analisis data yang terdiri dari beberapa langkah yaitu, reduksi data, data display atau penyajian, penarikan kesimpulan/ verifikasi. (Miles dan Huberman, 2007:16). Sehingga dapat mudah dipahami, dengan cara mengumpulkan dan, mendefinisikan dalam kelompok, dilakukannya integrasi, disusun dalam pola serta mampu membuat kesimpulan yang dikhususkan pada orang lain.

Hasil Dan Pembahasan

1.1 Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Varians yang digunakan sangat membantu memberikan informasi tentang kinerja pendapatan yang bisa dibandingkan tahun pertahunnya. Berikut ini tabel varians pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017:

Tabel 3.1

Hasil Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017

| Tahun | Anggaran | Realisasi | Selisih Anggaran | Varians % |
|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 2013 | 2.777.458.207.457 | 2.741.528.022.330 | -35.930.185.127 | -1,29 |
| 2014 | 3.161.339.193.252 | 3.150.458.860.769 | -10.880.332.483 | -0,34 |
| 2015 | 3.631.183.716.298 | 3.540.619.065.782,11 | -90.564.650.516 | -2,49 |
| 2016 | 4.019.998.196.150,35 | 3.748.975.224.710,89 | -271.022.971.439 | -6,74 |
| 2017 | 4.528.926.876.090,17 | 4.422.978.254.586 | -105.948.621.504 | -2,34 |

Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Dari tabel di atas maka terdapat selisih anggaran dan persentase varians yang negatif. Melalui selisih tersebut dapat diketahui tingkat efektivitas pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Garut. Hasil perhitungan varians yang menunjukkan angka negatif memiliki arti bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Garut selama tahun anggaran 2013-2017 tidak dapat mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Selisih kurang terendah terjadi pada tahun 2014 dengan persentase varians sebesar 0,34% dan nominal 10.880.332.483. Selisih kurang tertinggi terjadi pada tahun 2016, dengan persentase varians sebesar -6,74%. Apabila dilihat dari persentase memang tidak terlalu besar, namun apabila dilihat secara nominal selisih kurang cukup signifikan yaitu sebesar 271.022.971.439.

Sedangkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja hasilnya yaitu, Pendapatan pembiayaan terdapat beberapa halangan dan gangguan untuk perolehan tujuan pendapatan daerah yang telah disepakati sebelumnya seperti keterlambatan penetapan APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 yang berdampak pada penyerapan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Permasalahan seperti perkembangan ekonomi dunia turut mempengaruhi terhadap pendapatan pemerintah pusat, yang berimbas

pada capaian kinerja pendapatan daerah untuk jenis dana perimbangan, sehingga pendapatan daerah tidak sesuai dengan perolehan dana yang telah disepakati sebelumnya.

Secara keseluruhan varians anggaran pendapatan daerah Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2013-2017 memiliki persentase dan nominal selisih yang negatif serta fluktuatif. Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan analisis varians dapat dinilai kurang baik. Sebab realisasi pendapatan di bawah jumlah yang telah dianggarkan sehingga menghasilkan selisih kurang yang termasuk kategori tidak menguntungkan atau disebut *unfavourable variance*.

1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berikut pertumbuhan pendapatan Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017.

Tabel 3.2
Hasil Pertumbuhan PAD Kabupaten Garut TA 2013-2017

| Tahun | Realisasi PAD | Pertumbuhan PAD | Tingkat Pertumbuhan PAD% | Trend% |
|-------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| 2012 | 184.269.764.772 | | | |
| 2013 | 240.631.630.078 | 56.361.865.306 | 30,58 | |
| 2014 | 373.261.713.306 | 132.630.083.228 | 55,12 | 24,53 |
| 2015 | 419.201.758.615,11 | 45.940.045.309 | 12,31 | -42,81 |
| 2016 | 385.312.223.031,89 | -33.889.535.583 | -8,08 | -20,40 |
| 2017 | 692.255.365.083 | 306.943.142.051 | 79,66 | 87,75 |

Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel tersebut kita dapat mengetahui pendapatan asli daerah antara anggaran 2013 sampai 2015 selalu mengalami pertumbuhan positif yang artinya mengalami peningkatan. Meskipun dengan kecenderungan yang fluktuatif. Kemudian penerimaan pada tahun 2016 tentang pendapatan asli daerah terjadi penurunan kemudian kembali mengalami peningkatan ditahun 2017. Pertumbuhan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2016, PAD mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,08% yang artinya pendapatan asli daerah pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 33.889.535.583. Kemudian pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017, PAD mengalami pertumbuhan positif yang meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 79,66% dengan nominal peningkatan PAD sebesar 306.943.142.051. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa penurunan penerimaan PAD pada tahun 2016 terjadi karena faktor bencana alam dan adanya pajak daerah serta retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran namun tidak boleh dilakukan pemungutan. Berikut hasil pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Garut antara tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 3.3

Hasil Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017

| Tahun | Realisasi Pendapatan Daerah | Pertumbuhan Pendapatan Daerah | Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah% | Trend% |
|--------------|--|--|---|---------------|
| 2012 | 2.329.795.383.220 | | | |
| 2013 | 2.741.528.022.330 | 411.732.639.110 | 17,67 | |
| 2014 | 3.150.458.860.769 | 408.930.838.439 | 14,92 | -2,53 |
| 2015 | 3.540.619.065.782,11 | 390.160.205.013 | 12,38 | -2,53 |
| 2016 | 3.748.975.224.710,89 | 208.356.158.929 | 5,88 | -6,50 |
| 2017 | 4.422.978.254.586 | 674.003.029.875 | 17,98 | 12,09 |

Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Melalui tabel tersebut kita mengetahui pada tahun 2013 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,67% dengan nominal peningkatan pendapatan sebesar 411.732.639.110. Pada tahun 2014 pendapatan daerah tetap mengalami pertumbuhan positif, namun tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2014 adalah 14,92% dengan nominal peningkatan sebesar 408.930.838.439. Pada tahun 2015 pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang positif, namun tingkat pertumbuhannya kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2015 adalah 12,38% dengan nominal peningkatan pendapatan sebesar 390.160.205.013. Pada tahun 2016 pendapatan daerah masih mengalami pertumbuhan yang positif, namun tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2016 adalah 5,88% dengan nominal peningkatan pendapatan sebesar 208.356.158.929. Pertumbuhan pendapatan yang paling besar terjadi pada tahun 2017, dengan nominal peningkatan pendapatan daerah sebesar 674.003.029.875 dan persentase pertumbuhan sebesar 17,98%.

Secara umum pertumbuhan pendapatan Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 mengalami pertumbuhan yang baik. Meskipun tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami kecenderungan yang fluktuatif, namun pertumbuhan pendapatan selalu bergerak positif, kecuali pada tahun 2016 pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal tersebut berarti dapat dikatakan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan analisis pertumbuhan dapat dinilai cukup baik, sebab secara umum selalu mengalami pertumbuhan yang positif atau berarti pendapatan mengalami peningkatan.

1.3 Analisis Rasio Keuangan

1.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Besaran keterlibatan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah dapat dilihat di rasio derajat desentralisasi. Berikut rasio derajat desentralisasi Kabupaten Garut selama tahun anggaran 2013-2017.

Tabel 3.4

Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Garut TA 2013-2017

| Tahun | PAD | Pendapatan Daerah | Rasio Derajat Desentralisasi % | Kriteria |
|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2013 | 240.631.630.078 | 2.741.528.022.330 | 8,78 | Sangat Kurang |
| 2014 | 373.261.713.306 | 3.150.458.860.769 | 11,85 | Kurang |
| 2015 | 419.201.758.615,11 | 3.540.619.065.782,11 | 11,84 | Kurang |
| 2016 | 385.312.223.031,89 | 3.748.975.224.710,89 | 10,28 | Kurang |
| 2017 | 692.255.365.083 | 4.422.978.254.586 | 15,65 | Kurang |
| Rata-rata | | | 11,68 | Kurang |

Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel tersebut bahwa rasio derajat desentralisasi Kabupaten Garut pada tahun anggaran 2013-2017 secara umum masih rendah dengan perkembangan yang fluktuatif. Jumlah rata-rata rasio derajat desentralisasi Kabupaten Garut dari tahun anggaran 2013-2017 adalah sebesar 11,68% dan termasuk pada kriteria kurang. Bahkan pada tahun anggaran 2013 rasio derajat desentralisasi termasuk kepada kriteria minim (kurang) sekali sebab terdapat diinterval 0,00-10,00% yang menunjukkan persentase angka 8,78%. Kemudian pada tahun anggaran 2014 rasio derajat desentralisasi meningkat menjadi 11,85% dan termasuk pada kriteria minim (kurang) sebab terdapat diinterval 10,01-20,00%. Begitupun pada tahun 2015 rasio derajat desentralisasi masih berada pada kriteria kurang dan rasio mengalami penurunan menjadi 11,84%. Setelah itu juga tahun 2016, rasio derajat desentralisasi sekali lagi terjadi penurunan menjadi 10,28%. Pada tahun anggaran 2017, rasio derajat desentralisasi mengalami peningkatan cukup baik menjadi 15,65%. Namun tingginya rasio tersebut masih tetap berada dalam kriteria kurang, sebab rasio ada pada interval 10,01-20,00%.

Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan jika PAD masih belum mampu menjadi sumber keuangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi modal yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebab merupakan sumber penerimaan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengelolaannya. Secara keseluruhan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dinilai masih kurang. Sebab keikutsertaan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah masih tergolong pada kriteria minim (kurang), rata-rata persentase sebesar 11,68% dan berada pada interval 10,01-20,00%.

1.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dapat dilihat besaran ketergantungan pendapatan daerah kepada bantuan dari provinsi maupun pusat. Untuk mengetahui lebih lengkapnya berikut ini uraiannya.

Tabel 3.5

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017

| Tahun | Pendapatan Transfer | Pendapatan Daerah | Rasio Ketergantungan % | Kriteria |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 2013 | 2.391.885.221.952 | 2.741.528.022.330 | 87,25 | Sangat Tinggi |
| 2014 | 2.630.765.368.597 | 3.150.458.860.769 | 83,50 | Sangat Tinggi |
| 2015 | 3.114.721.307.167 | 3.540.619.065.782,11 | 87,97 | Sangat Tinggi |
| 2016 | 3.204.547.476.851 | 3.748.975.224.710,89 | 85,48 | Sangat Tinggi |
| 2017 | 3.587.055.889.503 | 4.422.978.254.586 | 81,10 | Sangat Tinggi |
| Rata-rata | | | 85,06 | Sangat Tinggi |

Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Garut sangat tinggi dan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jumlah rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Garut dari tahun anggaran 2013-2017 adalah sebesar 85,06% dan termasuk dalam kriteria ketergantungan sangat tinggi. Kriteria tersebut menunjukkan arti bahwa selama tahun anggaran 2013-2017 pendapatan daerah Kabupaten Garut bergantung sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hasil rasio tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan transfer berkontribusi sangat tinggi terhadap total pendapatan daerah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Garut disebabkan karena potensi pendapatan asli daerah yang belum tergal dengan baik sehingga penerimaan pendapatan sektor PAD masih rendah. Luasnya wilayah Kabupaten Garut mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan urusan rumah tangga pemerintah daerah tidak dapat dibiayai hanya dari penerimaan PAD saja, oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Garut mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam bentuk pendapatan transfer.

Secara keseluruhan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dinilai masih tinggi. Sebab tingkat ketergantungan dan kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah masih termasuk pada standard yang sangat tinggi, dengan rata-rata persentase sebesar 85,06% dan berada pada interval > 50,00.

1.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam hal ini pemerintah daerah mampu membiayai dirinya sendiri seperti dalam hal pembangunan infrastuktur, kegiatannya dalam mengelola pemerintahan, melakukan pelayanan kepada masyarakatnya dan juga dapat mengurus urusan rumah tangganya. Melalui hal ini

pemerintah dapat mengetahui keikutsertaan masyarakatnya dalam segala program pemerintah yang sedang atau akan dijalankan. Berikut rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut selama tahun anggaran 2013-2017:

Tabel 3.6

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Garut TA 2013-2017

| Tahun | PAD | Pendapatan Transfer | Rasio Kemandirian Daerah % |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| 2013 | 240.631.630.078 | 2.391.885.221.952 | 10,06 |
| 2014 | 373.261.713.306 | 2.630.765.368.597 | 14,19 |
| 2015 | 419.201.758.615,11 | 3.114.721.307.167 | 13,46 |
| 2016 | 385.312.223.031,89 | 3.204.547.476.851 | 12,02 |
| 2017 | 692.255.365.083 | 3.587.055.889.503 | 19,30 |
| Rata-rata | | | 13,81 |

Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Tabel tersebut menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 masih rendah dan mengalami perkembangan yang fluktuasi. Berikut ini tabel tingkat kemandirian pendapatan daerah Kabupaten Garut serta pola hubungan kemampuan daerah.

Tabel 3.7

Kriteria Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013-2017

| Tahun | Rasio Kemandirian Daerah% | Kemampuan Keuangan | Pola Hubungan | Interval |
|------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 2013 | 10,06 | Rendah Sekali | Instruktif | 0% - 25% |
| 2014 | 14,19 | Rendah Sekali | Instruktif | 0% - 25% |
| 2015 | 13,46 | Rendah Sekali | Instruktif | 0% - 25% |
| 2016 | 12,02 | Rendah Sekali | Instruktif | 0% - 25% |
| 2017 | 19,30 | Rendah Sekali | Instruktif | 0% - 25% |
| Rata-rata | 13,81 | Rendah Sekali | Instruktif | 0% - 25% |

Sumber: LRA Kabupaten Garut, data diolah oleh peneliti.

Tabel tersebut dapat terlihat ternyata rata-rata rasio kesiapan keuangan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 adalah sebesar 13,81% dan termasuk pada kriteria rendah sekali, sebab berada pada interval 0% - 25%. Dengan demikian dalam hal ini kemandirian pendapatan daerah Kabupaten Garut berada pada posisi yang rendah sekali. Kemampuan pendapatan asli daerah Kabupaten Garut dalam mendanai berbagai aspek kegiatan pemerintahannya yang menjadi urusan daerahnya masih sangat rendah. Selama tahun anggaran 2013-2017 pola hubungan keuangan daerah Kabupaten Garut masih tergolong dalam pola instruktif. Pola hubungan instruktif menurut (Halim, 2004:188) adalah kontribusi pemerintah daerah yang kurang aktif dari pada pemerintah pusat yang lebih aktif berkontribusi

dalam menjalankan pemerintahannya dikarenakan pemerintah daerah yang tidak bisa menjalankan otonominya sendiri.

Rasio kemandirian terendah dalam waktu 5 tahun terakhir terjadi di angka 10,06% pada tahun 2013. Sedangkan tertingginya berada pada tahun 2017 terdapat pada angka 19,30%. Meskipun rasio tersebut paling tinggi selama 5 tahun namun tetap saja mtempat yang sangat rendah jika menggunakan pola hubungan instruktif. Dimana dana perimbang masih lebih tinggi dibandingkan dana pendapatan asli di daerah tersebut.

Secara keseluruhan kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dinilai masih rendah sekali. Sebab kemampuan pendapatan asli daerah dalam mendanai penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah masih sangat rendah. Yang berada pada rata-rata persentase sebesar 13,81% dan berada pada interval 0% - 25%.

Simpulan

Berdasar kepada pembahasan serta hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan analisis varians (selisih) anggaran pendapatan dinilai kurang baik, sebab secara keseluruhan realisasi pendapatan di bawah jumlah yang telah dianggarkan dan termasuk kategori tidak menguntungkan atau disebut *unfavourable variance*. Sedangkan kinerja pendapatan daerah berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan dinilai cukup baik, sebab secara umum menunjukkan pendapatan selalu mengalami pertumbuhan yang positif atau berarti pendapatan mengalami peningkatan. Namun, kinerja pendapatan daerah berdasarkan rasio derajat desentralisasi dinilai masih kurang, dengan rata-rata persentase sebesar 11,68% dan berada pada interval 10,01-20,00%. Meskipun demikian, kinerja pendapatan daerah berdasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah dinilai masih sangat tinggi, dengan rata-rata persentase sebesar 85,06% dan berada pada interval > 50,00. Walaupun kinerja pendapatan daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dinilai masih rendah sekali dan termasuk pada pola hubungan instruktif, dengan rata-rata persentase sebesar 13,81% dan berada pada interval 0% - 25%.

Referensi

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Boediono. (2013). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPF.
- Darise, N. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT. Indeks.
- Elita. (2007). *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Hakim, R. (2008). *Analisis Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah*. Surabaya: DJPK
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*. Penerbit Bunga Rampai
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Hesel, N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.

- Hidayat, W. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan*. Malang: UMM Press.
- Jhingan, M.L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, H. (2007). *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar.
- Kusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Universitas Brawijaya.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Memah, E. (2013). *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1.
- Mulyana, B. (2006). *Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Edisi Pertama, Jakarta: LPKPAP.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH. UII PRESS.
- Noerdiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pudyatmoko, Y.S. (2009). *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Grasindo.
- Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Negara/Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah